
Kepemimpinan Transposisional Paulus sebagai Tawaran Etis-Theologis bagi Kepemimpinan Politik di Indonesia: Analisis 1 Korintus 9:19-23

Harlinton Simanjuntak

Sekolah Tinggi Teologi Reformed Indonesia

harlinton.simanjuntak@reformedindonesia.ac.id

Abstract

Indonesia's socio-political dynamics reveal a leadership model that tends to lose its ethical dimension—manifested in the form of leadership that is unempathetic, lip-service, oriented towards particular interests, and causes a crisis of public trust. This reality confirms the need for a transformation of the national leadership paradigm. This study uses a literature research method with a social hermeneutics approach to analyze the principles of Paul's transpositional leadership based on an analysis of 1 Corinthians 9:19–23. The results show that there are three ethical-theological principles that characterize Paul's transpositional leadership, namely service, empathy, and integrity. These three principles are rooted in the theology of Christ's incarnation, which presents incarnation as the core of true leadership. Thus, Paul's transpositional leadership provides a theological-ethical contribution to the reconstruction of the Indonesian leadership paradigm towards a model of leadership that is servant-oriented, participatory, and integrity-based as a manifestation of independence in serving others.

Keywords: Paul; Transpositional Leadership; Social Hermeneutics; Incarnation of Christ; Leadership Ethics.

Abstrak

Dinamika sosial-politik Indonesia memperlihatkan model kepemimpinan yang cenderung kehilangan dimensi etisnya – termanifestasi dalam bentuk kepemimpinan yang nir-empati, bersifat *lip-service*, berorientasi pada kepentingan partikular, dan menimbulkan krisis kepercayaan publik. Realitas ini menegaskan perlunya transformasi paradigma kepemimpinan nasional. Penelitian ini menggunakan metode riset literatur dengan pendekatan hermeneutika sosial untuk menganalisis prinsip-prinsip kepemimpinan transposisional Paulus berdasarkan analisis terhadap 1 Korintus 9:19–23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga prinsip etis-teologis yang menandai kepemimpinan transposisional Paulus, yaitu pelayanan, empati, dan integritas. Ketiga prinsip ini berakar pada teologi inkarnasi Kristus yang menampilkan inkarnasi sebagai inti dari kepemimpinan sejati. Dengan demikian, kepemimpinan transposisional Paulus memberikan kontribusi teologis-etis bagi rekonstruksi paradigma kepemimpinan Indonesia menuju model kepemimpinan yang melayani, partisipatif, dan berintegritas sebagai manifestasi kemerdekaan mengabdi bagi orang lain.

Kata Kunci: Paulus, Kepemimpinan Transposisional, Hermeneutika Sosial, Inkarnasi Kristus, Etika Kepemimpinan.

PENDAHULUAN

Kepemimpinan tetap menjadi topik yang hangat dan relevan dalam kehidupan manusia, sebab ia senantiasa berkelindan dengan dinamika personal maupun komunal di dalam masyarakat. Dalam tataran praktis, kepemimpinan bukan sekadar jabatan atau otoritas, melainkan suatu proses yang menuntut tanggung jawab etis dan sosial di dalam masyarakat. John W. Gardner, sebagaimana dikuti oleh Sunarto, menegaskan bahwa kepemimpinan adalah proses memengaruhi dan memberi teladan yang mendorong suatu kelompok mencapai tujuan bersama di dalam masyarakat.¹ Senada dengan itu, Garry Wills melihat kepemimpinan sebagai upaya membawa orang lain menuju tujuan yang sama melalui perjuangan kolektif.² Sementara itu, George Barna menekankan dimensi fungsional bahwa kepemimpinan adalah tindakan seorang pemimpin yang mengerahkan, memengaruhi, mengarahkan, dan mengendalikan para pengikutnya untuk mencapai orientasi bersama.³

Dengan demikian, ketiga pandangan tersebut memperlihatkan bahwa esensi kepemimpinan tidak semata terletak pada kemampuan mengelola dan mengendalikan, melainkan juga pada kapasitas membangun kepercayaan serta menumbuhkan intensi kolektif untuk mencapai tujuan bersama melalui perjuangan yang partisipatif. Pemahaman ini menjadi dasar yang penting untuk menilai bahwa berbagai fenomena sosial-politik kontemporer di Indonesia memiliki

keterkaitan erat dengan kualitas kepemimpinan yang mewarnai dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara.

Gelombang demonstrasi yang berujung kerusuhan di sejumlah daerah pada akhir Agustus 2025 dapat dipahami sebagai reaksi terhadap berbagai problem kepemimpinan politik di Indonesia, khususnya pada tataran nasional. Reaksi tersebut berakar pada sejumlah fenomena yang krusial dan aktual. Penelitian ini menyoroti empat fenomena utama yang tidak dimaksudkan untuk merepresentasikan seluruh persoalan kepemimpinan Indonesia, melainkan sebagai titik tolak analisis yang melatarbelakangi penelitian ini.

Pertama, dinamika politik-ekonomi Indonesia di tengah tekanan geopolitik global telah menimbulkan jeratan kemiskinan,⁴ keterbatasan akses kerja,⁵ sistem pendidikan nasional yang sarat masalah,⁶ serta problem sosial lainnya.

⁴ Terdapat ironis dalam data dan fakta, ketika Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa terjadi penurunan angka kemiskinan di Indonesia secara nasional, tetapi angka tersebut diikuti oleh fakta yang mengejutkan bahwa jumlah penduduk miskin di perkotaan justru mengalami peningkatan. Hal ini salah satu faktor penyebabnya adalah kenaikan harga komoditas pangan yang menyebabkan melemahnya daya beli masyarakat. Peningkatan jumlah penduduk miskin di perkotaan berpotensi meningkatkan angka kriminalitas, penurunan kualitas hidup, dan mengganggu keseimbangan sosial di dalam masyarakat. "Angka Kemiskinan Turun tapi Jumlah Penduduk Miskin di Perkotaan Meningkat, Apa yang Terjadi?," [bbc.com, 2025,](https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4g8gx48717o) <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4g8gx48717o>.

⁵ Tri Angga Kriswaningsih, "Anak Muda Soroti Akses Informasi Lowongan Kerja, Singgung Kemerataan dan Faktor Orang Dalam," [kompas.tv, 2025,](https://www.kompas.tv/ekonomi/625464/anak-muda-soroti-akses-informasi-lowongan-kerja-singgung-kemerataan-dan-faktor-orang-dalam) <https://www.kompas.tv/ekonomi/625464/anak-muda-soroti-akses-informasi-lowongan-kerja-singgung-kemerataan-dan-faktor-orang-dalam>.

⁶ Masalah yang paling krusial dalam bidang pendidikan di Indonesia terletak pada biaya pendidikan yang sangat tinggi. Hal ini

¹ Sunarto, "Kepemimpinan menurut Alkitab dan Penerapannya dalam Kepemimpinan Lembaga Kristen," *Te Deum: Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan* 5, no. 1 (2015): 98–99, <https://doi.org/10.51828/td.v5i1.114>.

² Sunarto, 99.

³ Sunarto, 99.

Situasi ini memunculkan kritik publik agar pemerintah segera bertindak. Namun, respons pemerintah kerap ditandai dengan narasi politik yang nir-empati, seolah-olah problematika tersebut tidak serius. Kebijakan politik-ekonomi yang lahir justru tampak jauh dari realitas penderitaan masyarakat. Berbagai bencana sosial maupun ekologis yang muncul akibat kebijakan yang mengabaikan aspek lingkungan semakin menegaskan adanya jarak antara teknokrasi pemerintah dengan realitas kehidupan rakyat.⁷

Kedua, janji-janji politik yang gemerlap pada masa kampanye kerap berhenti pada retorika yang bersifat *lip-service*. Ketika dihadapkan pada persoalan etis maupun kebijakan publik yang menuntut integritas, pejabat cenderung saling melempar tanggung jawab di dalam hirarki kepemimpinan. Hal ini memperlihatkan minimnya akuntabilitas yang seharusnya menjadi prinsip dasar

menimbulkan ketimpangan kualitas pendidikan di mana masyarakat yang memiliki kapital mampu mengakses pendidikan yang berkualitas sementara yang tidak memiliki kapital sulit bahkan terpaksa menerima kualitas pendidikan apa adanya. Selain itu, dukungan sarana prasarana pendidikan juga masih belum memadai secara nasional. Mereka yang berada di daerah (bahkan belum termasuk daerah 3T) juga masih memiliki keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan. Berbeda dengan pendidikan di perkotaan besar apalagi di daerah metropolis. “Pemerintah Harus Serius Tuntaskan 7 Masalah Krusial Pendidikan Nasional Indonesia,” ylbhi.or.id, 2024, <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/pemerintah-harus-serius-tuntaskan-7-masalah-krusial-pendidikan-nasional-indonesia/>.

⁷ Wahyu Eka Setyawan, “Politik Hijau di Indonesia: Relevansi, Tantangan, dan Jalan ke Depan,” indoprogress.com, 2025, <https://indoprogress.com/2025/06/politik-hijau-di-indonesia-relevansi-tantangan-dan-jalan-ke-depan/>; Ifanul Abidin, “Politik Ekologi Bendungan Nipah: Konflik Lahan, Hegemoni Negara, dan Perlawanannya Lokal di Sampang,” lhkp.muhammadiyah.or.id, 2025, <https://lhkp.muhammadiyah.or.id/politik-ekologi-bendungan-nipah-konflik-lahan-hegemoni-negara-dan-perlawanan-lokal-di-sampang/>.

kepemimpinan.⁸

Ketiga, agenda politik nasional sering kali lebih berpihak pada kepentingan elit dan kapitalis daripada kepentingan rakyat. Kebijakan publik yang dihasilkan lebih berfungsi sebagai legitimasi bagi agenda partikular segelintir kelompok dibandingkan sebagai upaya menghadirkan keadilan sosial. Bahkan, kebijakan yang merugikan rakyat kerap disepakati dengan cepat, sementara kebijakan yang berpotensi mengurangi keuntungan elit cenderung menemui jalan buntu.⁹

Keempat, kondisi carut-marut kepemimpinan politik di Indonesia juga ditandai dengan skeptisme masyarakat yang terekspresikan dalam adagium “*no viral no justice.*”¹⁰ Frasa ini

⁸ Akar permasalahan yang melatarbelakangi demonstrasi bukan sekadar tentang uang tetapi juga tentang kepercayaan publik, martabat pemerintahan, dan janji politik yang dilanggar oleh pemerintah dan parlemen. Ridwan Al-Makassary, “Protes Massa Agustus 2025: Menyahuti Akar Masalah dan Tawaran Solusi,” <https://nasional.sindonews.com/2025/08/16/protes-massa-agustus-2025-menyahuti-akar-masalah-dan-tawaran-solusi-1756800568?showpage=all>; Akar kekecewaan rakyat merupakan bentuk akumulasi ketidakpuasan dari banyak peristiwa sebelumnya termasuk korupsi dan tunjangan DPR. Masuki M. Astro, “Memungut Pelajaran Berharga dari Demo di DPR untuk Jaga Indonesia,” [antaranews.com, 2025,](https://www.antaranews.com/berita/5086333/memungut-pelajaran-berharga-dari-demo-di-dpr-untuk-jaga-indonesia?page=all) [antaranews.com/berita/5086333/memungut-pelajaran-berharga-dari-demo-di-dpr-untuk-jaga-indonesia?page=all](https://www.antaranews.com/berita/5086333/memungut-pelajaran-berharga-dari-demo-di-dpr-untuk-jaga-indonesia?page=all).

⁹ Prayogi Dwi Sulistyo, “Kebijakan Pemerintah Dianggap Berpihak kepada Kepentingan Oligarki,” kompas.id, 2021, https://www.kompas.id/artikel/demokrasi-semakin-terkikis;_Oligarki_Lemahkan_Civil_Society,_DPD_RI_Tak_Mau_Indonesia_Jadi_Negara_Gagal_Berdaulat; Gusti Grehenson, “Revisi UU Pilkada Batal, Buah Keberhasilan Aksi Protes Mahasiswa,” ugm.ac.id, 2024, <https://ugm.ac.id/id/berita/revisi-uu-pilkada-batal-buah-keberhasilan-aksi-protes-mahasiswa/>.

¹⁰ “Fenomena ‘No Viral, No Justice sebagai Kritik Penegakan Hukum,’ ”

menggambarkan persepsi bahwa respons pemerintah terhadap kritik dan persoalan rakyat hanya muncul bila suatu masalah mencapai viralitas di media sosial. Hal ini menandakan krisis kepercayaan terhadap institusi pemerintah, baik dalam aspek hukum maupun layanan publik lainnya. Sistem birokrasi yang berbelit turut memperdalam jurang ketidakpercayaan tersebut.

Keempat fenomena tersebut mengerucut pada empat bentuk krisis kepemimpinan: kepemimpinan yang nirempati, kepemimpinan yang minim akuntabilitas dan sekadar *lip-service*, kepemimpinan yang sarat agenda elit-partikular, dan kepemimpinan yang dilanda krisis kepercayaan. Situasi ini menuntut adanya terobosan untuk mereduksi praktik kepemimpinan yang bermasalah agar dapat ditemukan resolusi perbaikan. Sekalipun tidak mencerminkan keseluruhan problem kepemimpinan Indonesia, keempat fenomena ini dapat merepresentasikan gambaran kepemimpinan nasional dewasa ini. Penelitian ini juga tetap terbuka terhadap kemungkinan adanya fenomena lain yang relevan untuk dikaji.

Berangkat dari latar belakang tersebut, penelitian ini mengusulkan suatu prinsip kepemimpinan yaitu kepemimpinan transposisional Paulus sebagaimana tercermin dalam 1 Korintus 9:19–23 sebagai tawaran etis-teologis bagi kepemimpinan politik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika sosial untuk membaca teks, sehingga

komisiyudisial.go.id, 2025,
https://www.komisiyudisial.go.id/frontend/news_detail/15954/fenomena-no-viral-no-justice-sebagai-kritik-penegakan-hukum; Adhyasta Dirgantara, Shela Octavia, dan Danu Damarjati, "Masih Marak Sorotan No Viral No Justice di Tahun Pertama Prabowo-Gibran," *nasional.kompas.com*, 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/10/17/22162881/masih-marak-sorotan-no-viral-no-justice-di-tahun-pertama-prabowo-gibran>.

diharapkan menghasilkan kontribusi teoretis-etic yang aplikatif.

1 Korintus 9:19-23 telah diteliti dari beragam pendekatan metodologis dan *locus* penelitian. Beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Aska Aprilano Pattinaja, Andris Kiamani, dan Pulela Dewi Loisoklay, telah mengkaji teks tersebut dari perspektif misi.¹¹ Selanjutnya, Samuel Purdayanto, dengan kajian eksegesis, menekankan strategi penginjilan kontekstual bagi suku-suku terabaikan.¹² Sementara, E. Chrisna Wijaya, Asih Rachmani Endang Sumiwi, dan Joseph Christ Santo, melihat dari perspektif metode penginjilan yang digunakan Paulus dan menemukan terdapat tiga metode yang digunakannya.¹³

¹¹ Penelitian Aska Aprilano Pattinaja, Andris Kiamani, dan Pulela Dewi Loisoklay mengkaji teks 1 Korintus 9:19-23 dengan melihat karakter Paulus dalam kontekstual misi lintas budaya bagi para misionaris kontemporer. Mereka menemukan terdapat lima faktor pembentuk karakter bagi para misionaris yaitu menjadi hamba, hidup dalam ketaatan, rela membayar harga, teguh pada kebenaran, dan mampu beradaptasi. Aska Aprilano Pattinaja, Andris Kiamani, dan Pulela Dewi Loisoklay, "Kajian Metode Kontekstual Paulus 'Menjadi Seperti' Menurut 1 Korintus 9:19-23 sebagai Implementasi Karakter Misionaris," *Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 6, no. 2 (2024): 72–84, <http://stthami.ac.id/ojs/index.php/hami/issue/view/13>.

¹² Samuel Purdayanto melakukan eksegesis dengan analisis homiletik terhadap 1 Korintus 9:19-23 mengenai strategi penginjilan kontekstual Paulus untuk diterapkan pada penginjilan kepada suku-suku terabaikan dan menemukan tiga karakteristik penginjil lintas budaya yaitu rela menjadi hamba, rela beradaptasi dengan lingkungan, dan memiliki visi demi Injil. Samuel Purdayanto, "Strategi Melayani Unreached People Groups Berdasarkan Kajian Eksegesis 1 Korintus 9: 19-23," *Manna Rafflesia* 6, no. 2 (2020): 178–99, <https://doi.org/10.38091/man Raf.v6i2.122>.

¹³ E. Chrisna Wijaya, Asih Rachmani Endang Sumiwi, dan Joseph Christ Santo mengkaji 1 Korintus 9:1-23 untuk menemukan dan meneliti bagaimana Paulus berteologi. Hasil penelitian mereka menemukan bahwa Paulus menggunakan tiga pendekatan dalam berteologi yaitu dengan

Demikian pula dengan Iskandar Dinata Pasa dan Etni Grace Andi Yusuf, menekankan aspek penginjilan kontekstual di era disrupsi.¹⁴ Dengan demikian, penelitian ini berusaha mengisi celah penelitian dari perspektif kepemimpinan dengan melihat dari konteks sosial kontemporer khususnya dalam kepemimpinan politik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode riset literatur dengan pendekatan hermeneutika sosial yaitu sebuah pendekatan penafsiran yang menggunakan analisis terhadap dinamika konteks sosial untuk menilai suatu norma dan/atau struktur sosial di balik fenomena sosial, serta memengaruhi perilaku dan

pendekatan retorika, apologetika, dan kontekstual. Merelevansikan ketiga temuan tersebut dalam konteks masa kini sehingga dalam hal retorika, metode ini menekankan kemampuan komunikasi yang efektif melalui penggunaan dixi, istilah, ungkapan, dan kalimat yang mampu memengaruhi pendengarnya. Dalam hal apologetika, pendekatan ini menekankan esensi kebenaran berdasarkan prinsip iman Kristen dan tidak bergantung pada persepsi umum. Terakhir, metode kontekstual menekankan bahwa penting untuk melihat bagaimana realitas masyarakat dan budaya dalam penginjilan dengan tujuan utama Injil diberitakan dalam konteks budaya masyarakat sehingga dapat diterima. E. Chrisna Wijaya, Asih Rachmani Endang Sumiwi, dan Joseph Christ Santo, "Metode Berteologi Paulus Menurut 1 Korintus 9:1-23 dalam Konteks Masa Kini," *Manna Rafflesia* 10, no. 1 (2023): 148–61, <https://doi.org/10.38091/man Raf.v10i1.350>.

¹⁴ Dengan menggunakan menerapkan prinsip hermeneutika eksegesis terhadap 1 Korintus 9:19-27 Iskandar Dinata Pasa dan Etni Grace Andi Yusuf menemukan bahwa terdapat tiga strategi penginjilan kontekstual yang digunakan Paulus yaitu melalui dialog interaktif, penginjilan berdasarkan identifikasi budaya, dan menggunakan pendekatan *life-style* dalam penginjilan. Iskandar Dinata Pasa dan Etni Grace Andi Yusuf, "Strategi Penginjilan Kontekstual Rasul Paulus Berdasarkan 1 Korintus 9:19-27," *Teokristi: Jurnal Teologi Kontekstual dan Pelayanan Kristiani* 4, no. 1 (2024): 97–109, <https://doi.org/10.38189/jtk.v4i1.893>.

pemahaman sosial menuju cita-cita etis. Melalui pendekatan ini, teks 1 Korintus 9:19-23 dianalisis dengan mempertimbangkan konteks sosial yang melatarbelakanginya, sekaligus direlevansikan dengan konteks kepemimpinan politik di Indonesia. Pendekatan di dalam penelitian ini tetap mengacu kepada analisis tafsir eksegesis untuk menemukan prinsip-prinsip teologis-ethis yang terkandung dalam teks, kemudian menghubungkannya dengan realitas sosial kontemporer. Seluruh proses penelitian dilaksanakan melalui kajian literatur dengan menelusuri sumber-sumber akademis berupa Alkitab, monografi akademis, dan artikel-artikel jurnal bereputasi dalam rentang sepuluh tahun terakhir melalui basis data terpercaya seperti perpustakaan dan google scholar. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui sintesis premis-premis, sehingga menghasilkan kesimpulan teologis-ethis yang argumentatif dan akademis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keragaman Gaya Kepemimpinan dalam Perspektif Umum

Kepemimpinan telah dikaji dari berbagai disiplin ilmu dan menghasilkan variasi klasifikasi berdasarkan sistem, karakter, aspek psikologis, maupun prinsip manajerial. Keragaman ini memperlihatkan kompleksitas kepemimpinan sebagai fenomena sosial dan organisasi yang mustahil untuk direduksi hanya pada satu dimensi saja. Pertama, berdasarkan sistem dan visi organisasi, gaya kepemimpinan dapat dilihat dari kombinasi antara orientasi kerja dan persekutuan, yang menghasilkan empat model utama: *human relationship oriented* (berorientasi pada

hubungan antaranggota tetapi kurang menekankan produktivitas), *task and goal oriented* (berorientasi pada pencapaian kerja tanpa memperhatikan relasi), gaya kepemimpinan pasif (mengabaikan kerja dan persekutuan), serta gaya terpadu (menekankan kerja dan persekutuan secara seimbang).¹⁵

Kedua, berdasarkan bentuk kepemimpinan, dikenal gaya eksploratif, otoritatif, konsultatif, dan partisipatif. Gaya eksploratif dan otoritatif menonjolkan kontrol vertikal (*top-down* atau *bottom-up*), sedangkan gaya konsultatif dan partisipatif menekankan kolaborasi horizontal.¹⁶ Ketiga, berdasarkan karakter pemimpin, muncul variasi seperti gaya otokratis, birokratis, demokratis, kompromis, bebas, dan misionaris, yang masing-masing menunjukkan orientasi kepribadian dan nilai yang mendasari tindakan pemimpin.¹⁷ Keempat, dari aspek psikologis, gaya kepemimpinan dapat mencerminkan kondisi mental dan sikap pemimpin terhadap perubahan, mulai dari tipe bertahan, menimbun, menyerang, *marketing*, hingga produktif.¹⁸ Kelima, berdasarkan prinsip manajerial, gaya kepemimpinan dikategorikan menjadi *autocratic process*, *consultative process*, dan *group process*, yang memperlihatkan sejauh mana partisipasi bawahan dalam

¹⁵ Chlarles J. Keating, Kepemimpinan, Teori dan Pengembangannya, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1986): 11-14, dikutip dalam Stevri Indra Lumintang, *Theologia Kepemimpinan Kristen: Theokrasi di Tengah Sekularisasi Gereja Masa Kini*, ed. oleh Danik Astuti Lumintang et al. (Jakarta: Geneva Insani Indonesia, 2015), 351–53.

¹⁶ Sukanto Reksodiprodjo, Dasar-Dasar Management (Yogyakarta: BPFE, 1986): 61, dikutip dalam Sugiyanto Wiryoputro, *Dasar-Dasar Manajemen Kristiani*, ed. oleh Rika Uli Napitupulu-Simarangkir, 6 ed. (Jakarta, 2009), 97.

¹⁷ Lumintang, *Theologia Kepemimpinan Kristen: Theokrasi di Tengah Sekularisasi Gereja Masa Kini*, 353–56.

¹⁸ Wiryoputro, *Dasar-Dasar Manajemen Kristiani*, 98–99.

proses pengambilan keputusan.¹⁹

Dari kelima kategori di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar model kepemimpinan modern berfokus pada dimensi fungsional, struktural, dan psikologis, namun belum sepenuhnya menjawab dimensi etis dan teologis dari kepemimpinan. Padahal, dalam konteks sosial-politik yang sarat kepentingan dan krisis kepercayaan seperti di Indonesia, kepemimpinan yang berakar pada nilai-nilai teologis seperti pelayanan, empati, dan integritas menjadi sangat mendesak. Di sinilah kepemimpinan transposisional Paulus berdasarkan 1 Korintus 9:19-23 menawarkan paradigma alternatif yang menempatkan pelayanan sebagai inti kepemimpinan.

Kepemimpinan dan Kekuasaan

Kepemimpinan selalu berkelindan dengan kekuasaan. Tetapi, sejauh mana kekuasaan itu dioperasionalkan dalam kepemimpinan merupakan hal yang paling krusial untuk menilai apakah suatu dinamika kepemimpinan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip etis-teologisnya. Dalam pandangan Fridayana Yudiaatmaja, kekuasaan berkaitan erat dengan pengaruh dan otoritas, yang berfungsi sebagai sarana untuk menggerakkan tindakan dan mencapai tujuan tertentu.²⁰ Walter Nord, sebagaimana dikutip oleh Yudiaatmaja, mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan untuk mengatur dan memengaruhi arah penggunaan energi, sumber daya, dan dana guna mencapai sasaran yang berbeda dari tujuan lainnya.²¹

¹⁹ Wiryoputro, 99–100.

²⁰ Fridayana Yudiaatmaja, “Kepemimpinan: Konsep, Teori, dan Karakternya,” *Media Komunikasi FPIPS* 12, no. 2 (2013): 31, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/mkfis/article/view/1681>.

²¹ Yudiaatmaja, 31.

Sementara itu, Bierstedt menegaskan bahwa kekuasaan merupakan kapasitas untuk menggunakan kekuatan, sedangkan Roger memahami kekuasaan sebagai potensi untuk memberikan pengaruh.²²

Pemikiran Machiavelli, sebagaimana juga dikutip oleh Yudiaatmaja, menambahkan dimensi relasional bahwa hubungan yang efektif antara pemimpin dan yang dipimpin lahir dari keseimbangan antara cinta – yang merepresentasikan kekuasaan personal – dan rasa takut – yang mencerminkan kekuasaan struktural atau jabatan.²³

Lebih lanjut, French dan Raven membagi sumber kekuasaan ke dalam lima kategori yang saling melengkapi. Kekuasaan keahlian muncul dari kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan seorang pemimpin dalam bidang tertentu. Kekuasaan legitimasi bersumber dari jabatan atau posisi formal yang memberikan otoritas struktural. Kekuasaan referensi timbul dari kepribadian pemimpin yang karismatik dan mampu menginspirasi orang lain. Kekuasaan penghargaan bersandar pada kemampuan pemimpin memberikan pengakuan atau imbalan kepada bawahannya. Sementara itu, kekuasaan paksaan bertumpu pada kapasitas untuk memberikan sanksi atau hukuman melalui otoritas yang dimiliki.²⁴

Dengan demikian, kekuasaan dalam konteks kepemimpinan tidak semata-mata diukur dari posisi hierarkis, melainkan juga dari kemampuan personal, moral, dan relasional seorang pemimpin dalam memengaruhi serta mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Namun, dalam perspektif kepemimpinan transposisional, kekuasaan melampaui fungsi sosiologis dan manajerial semata.

Kekuasaan dan hierarki tidak lagi dipahami sebagai alat untuk mengontrol atau sekadar mencapai tujuan komunitas, melainkan sebagai partisipasi etis-teologis dalam panggilan Allah sendiri. Pemimpin transposisional menggunakan otoritasnya bukan demi kepentingan diri atau institusi, melainkan untuk mengaktualisasikan kehendak Allah dalam misi-Nya di dunia— sebuah kepemimpinan yang bersifat ontologis, karena berakar pada relasi dengan Allah yang memanggil, mengutus, dan membentuk pemimpin sebagai rekan sekerja-Nya dalam pelayanan bagi sesama.

Hermeneutika 1 Korintus 9:19-23: Kepemimpinan Transposisional Paulus

Surat 1 Korintus ditulis oleh Paulus untuk merespons persoalan-persoalan teologis-etis yang timbul di dalam jemaat Korintus. Donald Guthrie dalam Pengantar Perjanjian Baru mencatat sejumlah persoalan serius yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Jemaat ini dilanda spirit perpecahan karena adanya pembedaan kelompok berdasarkan figur rohani tertentu (1 Kor. 1:10-17); mereka juga bergumul dengan masalah moralitas yang parah, seperti kasus perzinahan dan inses (1 Kor. 5:1-13); serta praktik asusila yang berakar pada pengaruh budaya pagan setempat. Selain itu, terdapat masalah keadilan, di mana jemaat justru mencari penyelesaian hukum kepada pihak dari luar gereja (1 Kor. 6:1-11); persoalan etis dalam pernikahan dan seksualitas (1 Kor. 7); perdebatan mengenai makanan yang dipersembahkan kepada berhala (1 Kor. 8-10); ketidakteraturan dalam ibadah publik (1 Kor. 11); kesombongan rohani terkait karunia-karunia (1 Kor. 12-14); serta kebingungan teologis mengenai kebangkitan dan akhir zaman (1 Kor. 15).²⁵

²² Yudiaatmaja, 31.

²³ Yudiaatmaja, 31-32.

²⁴ Yudiaatmaja, 32.

²⁵ Donald Guthrie, *Pengantar Perjanjian Baru Volume 2*, trans. oleh Hendry Ongkowidjojo

Semua masalah tersebut memperlihatkan bahwa jemaat di Korintus sedang mengalami krisis identitas dan kepemimpinan rohani. Kepemimpinan Paulus dipertanyakan, bahkan otoritas kerasulannya diragukan. Dalam konteks inilah, gaya kepemimpinan Paulus menjadi relevan untuk direlevansikan dalam konteks keindonesiaaan kita oleh karena Paulus membangun kepemimpinannya di atas dasar pelayanan dan solidaritas dengan jemaat. Paulus tidak memanfaatkan otoritas kerasulannya untuk menguasai melainkan dengan pengosongan diri untuk melayani sebanyak mungkin orang agar mereka mendapat bagian dalam karya keselamatan Allah melalui Kristus (1 Kor. 9:19-23).

Dengan demikian, masalah-masalah etis-teologis yang disebutkan Guthrie di atas bukan sekadar notulensi historis, melainkan konteks sosial-teologis yang mengekspresikan model kepemimpinan yang bersifat transposisional: kepemimpinan yang menjelma melalui pengosongan diri, partisipasi, dan empati dalam relasi dengan orang lain. Prototipe inilah yang menantang paradigma kepemimpinan yang hierarkis, elitis, dan otoritarian yang juga masih membumbui dalam konteks Indonesia.

1 Korintus 9:19-23 merupakan satu kesatuan dalam konteks teks 1 Korintus. Matthew Henry menafsirkan pasal 9 sebagai pleidoi Paulus terhadap kerasulannya, di mana ia menegaskan status, otoritas, dan hak-haknya sebagai rasul Yesus Kristus.²⁶ Sebagai rasul, Paulus sebenarnya mempunyai hak atas kebutuhan jasmani (ay. 4-5); kebebasan dari kewajiban mencari nafkah (ay. 6); dan hak

(Surabaya: Momentum, 2010), 51–53.

²⁶ Matthew Henry, *Surat Roma, 1 & 2 Korintus*, ed. oleh Johnny Tjia, Barry van der Schoot, dan Stevy W. Tilaar, trans. oleh Iris Ardanewari et al. (Surabaya, Jawa Timur: Momentum, 2015), 637.

untuk menerima upah dari pelayanannya dalam pemberitaan Injil (ay. 7-12a). Namun demikian, Paulus secara sadar memilih untuk tidak menggunakan hak-hak tersebut. Keputusannya untuk melepaskan hak demi pekerjaan Injil menunjukkan orientasi etis yang mendalam: kebebasan yang dimilikinya tidak digunakan untuk kepentingan pribadi, melainkan untuk melayani dan menjangkau sebanyak mungkin orang bagi Kristus.

Senada dengan itu, Craig S. Keener menegaskan bahwa Paulus menggunakan dirinya sendiri sebagai teladan untuk memperlihatkan bahwa demi Injil dan demi kepentingan orang lain, ia dengan sadar dan sukarela melepaskan haknya atas dukungan materi, menyesuaikan diri dengan berbagai golongan tanpa kehilangan komitmen dan kesetiaan pada Injil, serta menjalani disiplin diri yang ketat agar dapat “memenangkan” sebanyak mungkin orang dan tidak gagal dalam panggilannya.²⁷

Di sisi lain, Anthony C. Thiselton menegaskan bahwa 1 Korintus 9:19-23 merupakan puncak argumentasi Paulus dalam pasal 9, yang memperlihatkan bahwa strategi hidup dan pelayanannya, terutama solidaritas dengan orang lain khususnya yang lemah, berakar pada hakikat Injil; bukan pada pragmatisme atau peneguhan diri, dan menjadi prinsip utama yang mengarahkan kebebasannya serta tindakan rasulinya.²⁸

Michael J. Gorman menegaskan bahwa Paulus memilih untuk melepaskan hak-haknya khususnya hak atas dukungan finansial merupakan perwujudan dari

²⁷ Craig S. Keener, “1-2 Corinthians,” in *New Cambridge Bible Commentary* (New York: Cambridge University Press, 2005), 77–82.

²⁸ Anthony C. Thiselton, “The First Epistle to the Corinthians: A Commentary on the Greek Text,” in *The New International Greek Testament Commentary* (Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 2000), 698–99.

keteladanan Kristus yang bersifat melayani, merendahkan diri, dan berorientasi pada keselamatan orang lain, sehingga hal itulah yang menjadi inti dari misi kerasulan Paulus dan partisipasinya dalam Injil.²⁹

Paulus menegaskan bahwa sebagai rasul ia “bebas terhadap semua orang,” namun kebebasan itu justru digunakan untuk “menjadi hamba bagi semua orang.” Mengutip Martin Luther, Utley menulis: “Seorang Kristen adalah tuan yang bebas atas segala sesuatu dan tidak tunduk kepada siapa pun. Seorang Kristen adalah hamba yang melayani dalam segala hal, tunduk pada semua orang.”³⁰ Dengan demikian, kebebasan Paulus bukanlah kebebasan untuk mendominasi, melainkan kebebasan yang berpihak kepada pelayanan dan solidaritas. Kebebasan tersebut menandai kemandirian etis yang bertumpu pada kasih, bukan kuasa.

Lebih jauh lagi, tindakan Paulus “menjadikan diri sebagai hamba bagi semua orang” mengindikasikan karakter kerendahan hati yang mendalam. Henry menafsirkan bahwa Paulus bertindak seolah-olah ia tidak memiliki hak istimewa sama sekali.³¹ Parshall, sebagaimana dikutip oleh Samuel Purdaryanto, menandaskan bahwa sikap ini merupakan cerminan akan kerelaan untuk menanggung penderitaan dan kesusahan demi orang

lain.³² Dengan demikian, Paulus memperlihatkan gaya kepemimpinan yang berakar pada pelayanan (*servant leadership*), di mana kerendahan hati menjadi manifestasi dari kasih yang berorientasi pada misi.

Intensionalitas dari seluruh perikop ini tampak dalam ayat 19b: “supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang.” Bagi Utley, intensionalitas ini menekankan bahwa tujuan utama Paulus bukanlah legitimasi kekuasaan, melainkan partisipasi dalam karya penginjilan.³³ Kepemimpinan yang diperlihatkan Paulus bersifat misioner dan solider – mendorong transformasi spiritual dan sosial melalui pengosongan diri dan empati terhadap mereka yang dilayani.

Dalam ayat 20-22, Paulus menegaskan prinsip “menjadi seperti” orang yang dilayani: menjadi seperti orang Yahudi, seperti yang di bawah hukum, seperti yang tidak di bawah hukum, bahkan seperti yang lemah. Paradigma ini memperlihatkan fleksibilitas etis dan sosial yang memungkinkan Paulus untuk “berinkarnasi” ke dalam pengalaman orang lain tanpa kehilangan identitasnya di dalam Kristus. Di sinilah tampak jelas inti dari kepemimpinan transposisional: kemampuan untuk berpindah posisi baik secara sosial, emosional, dan kultural demi menjembatani kesenjangan dan memperluas ruang solidaritas tanpa kehilangan jati diri yang sesungguhnya.

Dari analisis di atas, dapat disimpulkan tiga prinsip teologis-etis kepemimpinan transposisional Paulus. Pertama, kepemimpinan itu berakar pada kebebasan yang dikonversi oleh Injil.

²⁹ Michael J. Gorman, *1 Corinthians: A Theological, Pastoral, and Missional Commentary* (Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 2025), 255–60. Referensi ini berdasarkan sumber berbentuk pdf bukan buku cetak yang diakses melalui penelurusan di google.

³⁰ Bob Utley, “Surat-surat Paulus kepada Sebuah Gereja yang Bermasalah: 1 dan 2 Korintus,” in *Kumpulan Komentari Panduan Belajar Perjanjian Baru, Vol. 8* (Marshall, Texas: Bible Lesson International, 1997), 158, https://www.freebiblecommentary.org/indonesian_bible_study.htm.

³¹ Henry, *Surat Roma, 1 & 2 Korintus*, 649.

³² Purdaryanto, “Strategi Melayani Unreached People Groups Berdasarkan Kajian Eksegetis 1Korintus 9: 19-23,” 187.

³³ Utley, “Surat-surat Paulus kepada Sebuah Gereja yang Bermasalah: 1 dan 2 Korintus,” 158.

Kedua, kepemimpinan bersifat adaptif sekaligus partisipatif dalam konteks sosial yang beragam. Ketiga, kepemimpinan menuntut pengosongan diri sebagai wujud tanggung jawab sosial dan misi Injil. Dengan demikian, kepemimpinan transposisional Paulus dapat dipahami sebagai model atau gaya kepemimpinan yang menembus batas-batas identitas diri, status sosial, dan kepentingan pribadi demi kebaikan bersama. Model ini menciptakan rasa solidaritas tanpa batas yang merepresentasikan etos inkarnasional Kristus di dalam praksis kepemimpinan.

Kepemimpinan Transposisional dan Relasinya dengan Inkarnasi Kristus

Konsep-konsep kepemimpinan pada umumnya selalu bertolak dari subjek pemimpin itu sendiri – baik yang berorientasi pada sistem dan visi organisasi, karakter dan psikologi pemimpin, maupun pada prinsip-prinsip manajerial yang melandasinya. Dalam paradigma seperti ini, kepemimpinan cenderung dimaknai sebagai strategi untuk mengarahkan orang lain mencapai tujuan tertentu. Namun, model semacam ini sering kali mengabaikan dimensi moral dan spiritual yang menjiwai relasi antara pemimpin dan yang dipimpin.

Demikian pula dalam ranah kekristenan, pemahaman tentang kepemimpinan menampilkan ragam bentuk dan definisi, tergantung pada konteks yang memengaruhi cara pandang terhadap peran pemimpin. Setiap model memiliki keunggulan dan keterbatasannya masing-masing. Sunarto mengatakan, “Kepemimpinan Kristen adalah seorang hamba yang dipanggil oleh Allah untuk melakukan tugas-tugas kepemimpinan sesuai dengan kehendak Allah dan memimpin dengan karakter seperti Kristus

dalam menunaikan tugas panggilannya.”³⁴

Sementara itu bagi Stevri Indra Lumintang: “Kepemimpinan Kristen adalah suatu aktivitas sadar seseorang yang karena panggilan Tuhan bagi dirinya menjadi alat Tuhan untuk mendeklarasikan Tuhan sebagai pemimpin yang melayani semua umat manusia pada umumnya dan melayani umat percaya (gereja) pada khususnya dengan cara memberitakan firman-Nya yang murni baik perkataan maupun perbuatan, menjadi model yang hidup, rela memberi segalanya untuk umat yang dipimpin dan memberi petunjuk untuk melihat ke depan (visi), memutuskan, memengaruhi, memperlengkapi, menuntun, memotivasi dan mengevaluasi umat Tuhan dalam terang firman Tuhan demi terlaksananya kehendak Tuhan secara berkesinambungan dan terwujudnya misi Tuhan dari generasi ke generasi di dalam dan melalui gereja kepada dunia di segala bidang.”³⁵

Kepemimpinan transposisional, sebagai salah satu bentuk kepemimpinan Kristen, lahir dari kesadaran bahwa kepemimpinan sejati tidak berpusat pada subjek pemimpin, melainkan pada inisiatif Allah yang memilih dan memanggil pemimpin untuk berpartisipasi dalam karya-Nya.³⁶ Lumintang menjelaskan kepemimpinan transposisional sebagai kepemimpinan yang “dinamis-kreatif,” yakni gaya kepemimpinan yang secara terus-menerus mengembangkan dan menyesuaikan model kepemimpinan demi

³⁴ Sunarto, “Kepemimpinan menurut Alkitab dan Penerapannya dalam Kepemimpinan Lembaga Kristen,” 99–100.

³⁵ Lumintang, *Theologia Kepemimpinan Kristen: Theokrasi di Tengah Sekularisasi Gereja Masa Kini*, 251.

³⁶ Gunar Sahari, “Peranan Pemimpin Kristen dalam Meningkatkan Kualitas Kerukunan Antar Umat Beragama yang Pluralis,” *Jurnal Luxnos* 4, no. 2 (2018): 173, <https://doi.org/10.47304/jl.v4i2.129>.

pertumbuhan kedewasaan bersama dalam firman Tuhan.³⁷ Dengan demikian, kepemimpinan transposisional menolak model kepemimpinan yang bersifat statis, hierarkis, elitis, otoritarian, dan menggantikannya dengan tipe kepemimpinan yang partisipatif, dialogis, serta mengakar pada teologis inkarnasi.

Istilah transposisional sendiri berasal dari kata *transposition*, yang secara harfiah berarti “perpindahan posisi.” Dalam konteks teologis, istilah ini menunjuk pada dinamika pemimpin yang rela berpindah posisi dan menyesuaikan diri dengan realitas yang dipimpin tanpa kehilangan integritas identitasnya di dalam Kristus. Dengan demikian, sebagaimana ditegaskan Lumintang, kepemimpinan transposisional bukan sekadar proses adaptasi untuk mencapai kedewasaan bersama, tetapi lebih jauh merupakan proses dinamika menjadi serupa dengan Kristus.

Kepemimpinan Paulus yang tercermin dalam 1 Korintus 9:19–23 memperlihatkan dimensi transposisional ini: kepemimpinan yang dinamis dan kreatif, namun berakar pada inkarnasi Kristus dalam Filipi 2:5–11. Kristus menanggalkan kemuliaan ke-Allahan-Nya, mengosongkan diri, dan menjadi sama dengan manusia; bahkan, dalam keadaan sebagai manusia, Ia rela merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Dari teladan ini, kepemimpinan Paulus mengambil bentuk: pemimpin yang tidak menegakkan otoritasnya, melainkan menghadirkan diri dalam solidaritas dan partisipasi. Dengan demikian, kepemimpinan transposisional Paulus yang berakar pada kenosis Kristus yaitu bersifat dinamis, kreatif, dan partisipatif — menegaskan bahwa

fleksibilitas bukan tanda kompromi, melainkan manifestasi dari kasih yang mengosongkan diri.

Analisis Kontekstual: Implementasi Kepemimpinan Indonesia

Konteks fenomena sosial-politik Indonesia memperlihatkan dinamika kepemimpinan yang kompleks antara idealisme moral dan praktik kekuasaan yang sering kali kehilangan dimensi etisnya. Dalam konteks demikian, prinsip kepemimpinan transposisional Paulus menawarkan kerangka korektif sekaligus transformatif. Kebebasan dalam konteks Paulus bukanlah kemerdekaan yang menindas yang lemah, melainkan kemerdekaan untuk melayani. Sebagaimana ditegaskan dalam 1 Korintus 9:19, Paulus tidak menggunakan kebebasannya untuk menguntungkan diri sendiri, tetapi untuk menjadi hamba bagi semua orang. Ia mengambil logika terbalik dari paradigma kekuasaan konvensional dengan menjadikan dirinya pelayan bagi yang dilayani. Dalam konteks Indonesia, fenomena kepemimpinan yang nir-empati dan berorientasi pada kepentingan partikular justru memperlihatkan bentuk kemerdekaan yang menindas dan mempertahankan privilese. Ini menyingkapkan keterbatasan etis para pemimpin yang gagal memahami bahwa esensi kepemimpinan sejati bukanlah melegitimasi kuasa, melainkan mewujudkan pengorbanan diri demi solidaritas bersama.

Prinsip kedua dari kepemimpinan transposisional Paulus menyoroti dimensi adaptif sekaligus partisipatif. Dalam 1 Korintus 9:20–22, Paulus menegaskan kesediaannya untuk “menjadi seperti” orang lain, bukan untuk mencari popularitas, melainkan untuk ikut serta dalam penderitaan dan pengharapan

³⁷ Lumintang, *Theologia Kepemimpinan Kristen: Theokrasi di Tengah Sekularisasi Gereja Masa Kini*, 358.

mereka. Dalam konteks kepemimpinan Indonesia, praktik *lip-service* sering kali menyerupai adaptivitas retoris tanpa partisipasi praksis. Pemimpin semacam ini tampak responsif secara verbal, namun absen dalam keterlibatan nyata terhadap penderitaan masyarakat. Di sini Paulus menampilkan kontras yang tajam: adaptivitas sejati bukan strategi elektoral, melainkan tindakan solidaritas. Dengan demikian, kepemimpinan adaptif-partisipatif Paulus mengoreksi kecenderungan kepemimpinan populis yang hanya menyentuh permukaan moralitas publik tanpa mengubah realitas sosial.

Selanjutnya, krisis kepercayaan publik terhadap kepemimpinan di Indonesia memperlihatkan kehilangan dasar etis kenosis – kerelaan untuk mengosongkan diri dari kepentingan pribadi. Paulus memperlihatkan bahwa kredibilitas pemimpin justru berakar dari kerendahan hati dan integritas pelayanan. Dalam perspektif kenosis Kristus (Flp. 2:5–11), pengosongan diri bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan moral untuk melayani tanpa pamrih. Pemimpin yang rendah hati tidak takut mengakui keterbatasannya, sebab justru dari pengakuan itulah tumbuh kepercayaan publik yang otentik. Dengan demikian, krisis kepercayaan yang melanda kepemimpinan Indonesia menunjukkan absennya spiritualitas kenosis sebagai basis etika publik.

Ragam fenomena kepemimpinan Indonesia yang sarat nir-empati, kepentingan partikular, dan *lip-service* menantang pembacaan kita terhadap Paulus untuk tidak berhenti pada tataran etika personal, melainkan menafsirkan kembali teks sebagai panggilan untuk rekonstruksi sosial yang berakar pada kenosis Kristus. Kepemimpinan yang krisis

kepercayaan publik juga mengingatkan bahwa kejujuran dan kerendahan hati bukan tanda ketidakmampuan, melainkan ekspresi otentik dari pemimpin yang meneladani Kristus. Dengan demikian, hermeneutika kepemimpinan Paulus bukan sekadar alat koreksi moral-etis, tetapi praksis transformatif bagi ruang publik. Kepemimpinan transposisional Paulus menjadi paradigma korektif bagi krisis kepemimpinan Indonesia sekaligus pengingat bagi praktik pelayanan Kristen: bahwa kepemimpinan sejati adalah aktualisasi pelayanan bagi kepentingan orang banyak demi kemajuan Injil.

Prinsip Etis-Teologis Kepemimpinan Transposisional: Pelayanan, Empati, dan Integritas

Konsep kepemimpinan transposisional mungkin terdengar baru dalam kepemimpinan Kristen, namun sebenarnya konsep ini berakar pada kenosis Kristus dan dapat terwujud dalam pelayanan, empati, dan integritas. Istilah transposisional merupakan konsep perpindahan posisi dari keilahian kepada kemanusiaan tanpa kehilangan identitas ilahi – sebuah model dinamika inkarnasional yang memengaruhi kepemimpinan Paulus. Tiga prinsip tersebut bukan sekadar nilai moral, tetapi etos teologis yang keluar dari relasi partisipatif Allah Tritunggal dalam inkarnasi Sang Firman.

Kepemimpinan Paulus sejatinya berpusat pada pelayanan. Dalam konteks kepemimpinan Indonesia yang sering kali menampilkan hirarki simbolisme yang identik dengan privilese dan otoritarianisme terselubung dapat dikritik melalui paradigma transposisional di mana kepemimpinan bukan ajang perebutan kekuasaan melainkan panggung pengabdian.

Empati merupakan dinamika transposisional yang memindahkan diri ke dalam pengalaman orang lain tanpa kehilangan identitas diri. Paulus menunjukkan empati bukan sekadar sentimen emosional yang berakar pada aspek psikologis dan humanisme, melainkan aksi solidaritas yang hadir dan berpartisipasi dalam penderitaan orang lain yang berakar pada kesadaran akan penyebusan dari penderitaan.

Integritas merupakan kesatuan integral antara identitas dan tindakan yang meneguhkan kepercayaan orang lain. Paulus menunjukkan integritasnya dalam paradoks kuasa: kuasa yang lahir dari kerelaan untuk mengabdi, bukan menguasai. Dengan demikian, integritas Paulus membentuk integrasi kebenaran Injil yang memerdekaan dengan kesaksian hidup yang mengabdi.

Ketiga prinsip etis-teologis tersebut membentuk etos kepemimpinan transposisional Paulus yang relevan dalam konteks Indonesia. Kepemimpinan transposisional mengintegrasikan teologi inkarnasi dengan praksis sosial-politik yang membuka ruang baru bagi teologi kepemimpinan kontekstual di Indonesia yang berakar pada inkarnasi Kristus. Dengan demikian, kepemimpinan transposisional Paulus menjadi kontribusi etis-teologis yang integral dengan spirit keindonesiaan dan memperluas ruang pembacaan baru bagi tafsir etis-teologis terhadap teks-teks Alkitab yang lain.

KESIMPULAN

Kepemimpinan transposisional Paulus berdasarkan analisis 1 Korintus 9:19–23 menawarkan ruang paradigma baru bagi pengembangan prinsip teologis-etis dalam menafsirkan teks-teks Alkitab secara kontekstual terhadap dinamika

sosial-politik masyarakat. Paradigma ini tidak hanya menempatkan kepemimpinan sebagai tanggung jawab moral personal, tetapi sebagai praksis inkarnasi yang menghadirkan transformasi sosial melalui pelayanan, empati, dan integritas. Ketiga prinsip yang lahir dari teologi inkarnasional Kristus membuka ruang pembacaan baru terhadap teks-teks Alkitab, khususnya dalam konteks kepemimpinan Indonesia yang kerap kehilangan dimensi kenosis dan partisipasi sosial. Dengan demikian, kepemimpinan transposisional Paulus menghadirkan sintesis antara spiritualitas individual dan praksis sosial yang berorientasi pada pembebasan serta pemberdayaan.

Penelitian ini menyadari keterbatasannya karena berfokus pada analisis teologis-tekstual tanpa verifikasi empiris terhadap praktik kepemimpinan aktual. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian lanjutan yang bersifat praksis untuk menguji relevansi dan efektivitas prinsip transposisional dalam berbagai bentuk kepemimpinan, baik gerejawi maupun publik. Meskipun demikian, penelitian ini berkontribusi dalam membangun fondasi bagi teologi kepemimpinan kontekstual yang berakar pada inkarnasi Kristus, dengan menegaskan bahwa kepemimpinan sejati bukanlah tentang kuasa yang menguasai, melainkan kuasa yang melayani.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ifanul. “Politik Ekologi Bendungan Nipah: Konflik Lahan, Hegemoni Negara, dan Perlawanan Lokal di Sampang.” <https://lhkp.muhammadiyah.or.id/politik-ekologi-bendungan-nipah-konflik-lahan-hegemoni-negara-dan-perlawanan-lokal-di-sampang/>.

- Al-Makassary, Ridwan. "Protes Massa Agustus 2025: Menyahuti Akar Masalah dan Tawaran Solusi." [nasional.sindonews.com](https://nasional.sindonews.com/read/1614811/18/protes-massa-agustus-2025-menyahuti-akar-masalah-dan-tawaran-solusi-1756800568?showpage=all), 2025.
- Astro, Masuki M. "Memungut Pelajaran Berharga dari Demo di DPR untuk Jaga Indonesia." [antaranews.com](https://antaranews.com/berita/5086333/memungut-pelajaran-berharga-dari-demo-di-dpr-untuk-jaga-indonesia?page=all), 2025.
- bbc.com. "Angka Kemiskinan Turun tapi Jumlah Penduduk Miskin di Perkotaan Meningkat, Apa yang Terjadi?," 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4g8gx487l7o>.
- Dirgantara, Adhyasta, Shela Octavia, dan Danu Damarjati. "Masih Marak Sorotan No Viral No Justice di Tahun Pertama Prabowo-Gibran." [nasional.kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2025/10/17/22162881/masih-marak-sorotan-no-viral-no-justice-di-tahun-pertama-prabowo-gibran), 2025.
- dpd.go.id. "Oligarki Lemahkan Civil Society, DPD RI Tak Mau Indonesia Jadi Negara Gagal Berdaulat." Diakses 10 November 2025. <https://www.dpd.go.id/daftar-berita/oligarki-lemahkan-civil-society-dpd-ri-tak-mau-indonesia-jadi-negara-gagal-berdaulat>.
- Gorman, Michael J. *1 Corinthians: A Theological, Pastoral, and Missional Commentary*. Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 2025.
- Grehenson, Gusti. "Revisi UU Pilkada Batal, Buah Keberhasilan Aksi Protes Mahasiswa." [ugm.ac.id](https://ugm.ac.id/id/berita/revisi-uu-pilkada-batal-buah-keberhasilan-aksi-protes-mahasiswa/), 2024.
- Guthrie, Donald. *Pengantar Perjanjian Baru Volume 2*. Diterjemahkan oleh Hendry Ongkowidjojo. Surabaya: Momentum, 2010.
- Henry, Matthew. *Surat Roma, 1 & 2 Korintus*. Diedit oleh Johnny Tjia, Barry van der Shoot, dan Stevy W. Tilaar. Diterjemahkan oleh Iris Ardanewari, Herdian Aprilani, Lanny Murtihardjana, Paul A. Rajoe, Vera Setyawati, dan Tanti Susilawati. Surabaya, Jawa Timur: Momentum, 2015.
- Keener, Craig S. "1-2 Corinthians." In *New Cambridge Bible Commentary*. New York: Cambridge University Press, 2005.
- komisiyudisial.go.id. "Fenomena 'No Viral, No Justice sebagai Kritik Penegakan Hukum," 2025. https://www.komisiyudisial.go.id/frond/news_detail/15954/fenomena-no-viral-no-justice-sebagai-kritik-penegakan-hukum.
- Kriswaningsih, Tri Angga. "Anak Muda Soroti Akses Informasi Lowongan Kerja, Singgung Kemerataan dan Faktor Orang Dalam." [kompas.tv](https://www.kompas.tv/ekonomi/625464/anak-muda-soroti-akses-informasi-lowongan-kerja-singgung-kemerataan-dan-faktor-orang-dalam), 2025.
- Lumintang, Stevri Indra. *Theologia Kepemimpinan Kristen: Theokrasi di Tengah Sekularisasi Gereja Masa Kini*. Diedit oleh Danik Astuti Lumintang, Agustina Pasang, Elisua Hulu, dan Masye Rompa. Jakarta: Geneva Insani Indonesia, 2015.
- Pasa, Iskandar Dinata, dan Etni Grace Andi Yusuf. "Strategi Penginjilan Kontekstual Rasul Paulus Berdasarkan 1 Korintus 9:19-27." *Teokristi: Jurnal Teologi Kontekstual dan Pelayanan Kristiani* 4, no. 1 (2024): 97–109. <https://doi.org/10.38189/jtk.v4i1.893>.
- Pattinaja, Aska Aprilano, Andris Kiamani, dan Pulela Dewi Loisoklay. "Kajian Metode Kontekstual Paulus 'Menjadi Seperti' Menurut 1 Korintus 9:19-23 sebagai Implementasi Karakter Misionaris." *Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 6, no. 2

- (2024): 72–84.
<http://stthami.ac.id/ojs/index.php/hami/issue/view/13>.
- Purdaryanto, Samuel. “Strategi Melayani Unreached People Groups Berdasarkan Kajian Eksegetis 1Korintus 9: 19-23.” *Manna Rafflesia* 6, no. 2 (2020): 178–99.
https://doi.org/10.38091/man_raf.v6i2.122.
- Sahari, Gunar. “Peranan Pemimpin Kristen dalam Meningkatkan Kualitas Kerukunan Antar Umat Beragama yang Pluralis.” *Jurnal Luxnos* 4, no. 2 (2018): 171–92.
<https://doi.org/10.47304/jl.v4i2.129>.
- Setyawan, Wahyu Eka. “Politik Hijau di Indonesia: Relevansi, Tantangan, dan Jalan ke Depan.” indoprogress.com, 2025.
<https://indoprogress.com/2025/06/politik-hijau-di-indonesia-relevansi-tantangan-dan-jalan-ke-depan/>.
- Sulistyo, Prayogi Dwi. “Kebijakan Pemerintah Dianggap Berpihak kepada Kepentingan Oligarki.” [kompas.id](http://www.kompas.id), 2021.
<https://www.kompas.id/artikel/demokrasi-semakin-terkikis>.
- Sunarto. “Kepemimpinan menurut Alkitab dan Penerapannya dalam Kepemimpinan Lembaga Kristen.” *Te Deum: Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan* 5, no. 1 (2015): 95–116.
<https://doi.org/10.51828/td.v5i1.114>.
- Thiselton, Anthony C. “The First Epistle to the Corinthians: A Commentary on the Greek Text.” In *The New International Greek Testament Commentary*. Grand Rapids, Michigan: Eerdmans, 2000.
- Utley, Bob. “Surat-surat Paulus kepada Sebuah Gereja yang Bermasalah: 1 dan 2 Korintus.” In *Kumpulan Komentari Panduan Belajar Perjanjian Baru*, Vol. 8. Marshall, Texas: Bible Lesson International, 1997.
https://www.freebiblecommentary.org/indonesian_bible_study.htm.
- Wijaya, E. Chrisna, Asih Rachmani Endang Sumiwi, dan Joseph Christ Santo. “Metode Berteologi Paulus Menurut 1 Korintus 9:1-23 dalam Konteks Masa Kini.” *Manna Rafflesia* 10, no. 1 (2023): 148–61.
https://doi.org/10.38091/man_raf.v10i1.350.
- Wiryoputro, Sugiyanto. *Dasar-Dasar Manajemen Kristiani*. Diedit oleh Rika Uli Napitupulu-Simarangkir. 6 ed. Jakarta, 2009.
- ylbhi.or.id. “Pemerintah Harus Serius Tuntaskan 7 Masalah Krusial Pendidikan Nasional Indonesia,” 2024.
<https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/pemerintah-harus-serius-tuntaskan-7-masalah-krusial-pendidikan-nasional-indonesia/>.
- Yudiaatmaja, Fridayana. “Kepemimpinan: Konsep, Teori, dan Karakternya.” *Media Komunikasi FPIPS* 12, no. 2 (2013): 29–38.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/mkfis/article/view/1681>.